

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAN KEMANDIRIAN FISKAL DESA

Bobi Libra dan R.M. Amin

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Financing for Development and Fiscal Independence Village. The study is intended to take kesimpulandari problems facing Batu Sasak village that resulted in the financing of rural development is highly dependent on grants and subsidies from the Government of Kampar district. This research uses descriptive analysis with a qualitative approach, in which data is collected in the form of words, images, and not the numbers. The findings in the field problems faced by the village of Batu Sasak to finance rural development are: First, the lack of rules (fiscal policies) that govern it. Second, the village has not understanding of the mechanisms of development financing as an alternative to the conventional non rural development financing. Third, the lack of capital for rural enterprise development as an alternative source of financial revenue. Fourth. apathy of the villagers in the continuation of financing rural development.

Abstrak: Pembiayaan Pembangunan dan Kemandirian Fiskal Desa. Penelitian dimaksudkan untuk mengambil kesimpulandari permasalahan yang dihadapi Desa Batu Sasak yang mengakibatkan pembiayaan pembangunan desa sangat tergantung pada dana bantuan dan subsidi dari Pemerintah Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hasil temuan di lapangan permasalahan yang dihadapi Desa Batu Sasak terhadap pembiayaan pembangunan desa adalah: Pertama, belum adanya aturan (kebijakan fiskal) yang mengatur hal tersebut. Kedua, perangkat desa belum mengetahui/mengerti tentang mekanisme pembiayaan pembangunan non konvensional sebagai alternatif pembiayaan pembangunan desa. Ketiga, kekurangan modal bagi desa dalam pengembangan usaha sebagai sumber alternatif penerimaan keuangan. Keempat. sikap apatis masyarakat desa dalam kelanjutan pembiayaan pembangunan desa.

Kata Kunci: Desa, pembiayaan, pembangunan, dan anggaran

PENDAHULUAN

Kabupaten Kampar saat ini telah melaksanakan upaya mendukung desa dalam melaksanakan kewenangannya dan mengelola rumah tangganya. Hal ini dapat dilihat salah satu yang di amanatkan oleh dua kebijakan tersebut adalah Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai sumber pendapatan keuangan desa, pendapatan desa ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang berasal dari dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah. Alokasi Dana Desa (ADD) bagi perdesaan di Kabupaten Kampar di perlakukan pertama kali pada APBD tahun 2009 hingga saat ini.

Pendapatan keuangan desa yang berasal dari dana transfer pemerintah kabupaten. Semenjak diterapkan di Kabupaten Kampar menjadi sumber pemasukan yang favorit bagi keuangan desa sebagai sumber pembiayaan pembangunan

perdesaan. Ironis bahkan menjadi pendapatan utama dan dominan bagi seluruh desa di Kabupaten Kampar. Hal tersebut tergambar pada Anggaran Belanja Pendapatan Desa (APBDes) yang tiap tahun di evaluasi oleh Bupati Kampar melalui bahagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar semenjak program ini pertama kali bergulir di tahun 2009 hingga tahun 2011.

Desa Batu Sasak merupakan salah satu desa di Kecamatan termiskin di Kabupaten Kampar yaitu Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Secara kewilayahan Desa Batu Sasak geografisnya yang berada di daerah perbukitan dengan mayoritas penduduknya bermata pencarian di bidang perkebunan karet, gambir, dan coklat. Dari distribusi persentase penyebaran penduduk Desa Batu Sasak merupakan persentase tertinggi yaitu 10,66 persen di seluruh Kecamatan Kampar Kiri Hulu..Saat ini jumlah penduduk 1.124 jiwa de-

ngan pertumbuhan penduduk 1.24 persen pertahun.

Melihat dari kondisi di atas tentu semakin besar kebutuhan keuangan Desa Batu Sasak. Beorintasi daripenerimaan keuangan Desa Batu Sasak yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa. Terlihat Pendapatan Asli Desa (PADes) ini belum mampu membantu kebutuhan pembiayaan pembangunan yang besar bagi desa. Hal ini tergambarkan pada ABPDes Desa Batu Sasak tahun 2009-2011. Sumber pembiayaan pembangunan desa sangat tergantung padapenerimaan keuangan desa yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Kampar hingga mencapai 100% persen.

Porsi pendapatan asli desa hanya di peroleh Desa Batu Sasak pada tahun 2010 dan tidak signifikan mendukung keuangan desa, bahkan tidak cukup membiayai kegiatan rutin pemerintah desa. Melihat dengan kondisi alam yang berada di perbukitan mayoritas masyarakat yaitu 524 jiwa (91.17 persen) dari angkatan kerja Desa Batu Sasak bermata pencarian usaha utama di sektor perkebunan karet, coklat dan gambir. Dilihat dari luas perkebunan yang di miliki masyarakat Desa Batu Sasak relatif luas dengan kebun karet 15.000 Ha, gambir 200 Ha, dan coklat 100 Ha dengan rata-rata penghasilan perbulannya 250 Ton karet, 25 Ton gambir, 2 ton coklat.

Dalam kawasan desa ini juga dialiri beberapa sungai yang relatif dapat dimanfaatkan sebagai usaha perikanan bagi masyarakat desa, kawasan desa ini juga masih mempunyai hutan ulayat/adat yang belum di garap seluas 36000 Ha, serta baru-baru ini juga di temukan lahan batu bara yang cukup luas di sekitar Desa Batu Sasak. Potensi sedemikian yang dimiliki desa dan masyarakat desa, seharusnya dapat di manfaatkan oleh pemerintah desa, didalam menciptakan pendapatan asli desa. Salah satunya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pengepul dan penyalur hasil pertanian masyarakat desa ke pabrik, atau melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam memanfaatkan lahan hutan ulayat desa tersebut.

Untuk mengetahui pembiayaan pembangunan desa terlebih dahulu mengetahui definisi Biaya pembangunan daerah. Pembiayaan Pembangu-

nan daerah adalah seluruh pengeluaran yang di lakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan, yang dilaksanakan atau dikelola langsung aparatur pemerintah daerah melalui APBD (Kartasasmita, 1997). Memahami definisi tersebut dapat didefinisikan pembiayaan pembangunan desa adalah seluruh pengeluaran yang di lakukan oleh pemerintah desa untuk membiayai kegiatan pembangunan, yang dilaksanakan atau di kelola langsung aparatur pemerintah melalui APBDes.

Sumber pembiayaan pembangunan dapat diperoleh pemerintah dengan beberapa sumber dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang bersangkutan. Sumber-sumber pembiayaan tersebut dapat ditinjau dari dua, yaitu *pertama*, berdasarkan mekanisme anggaran pemerintah, dan *kedua*, berdasarkan mekanisme non-anggaran pemerintah (Fauzi, 2004).

Penelitian dimaksudkan untuk mengambil kesimpulan dari permasalahan yang dihadapi Desa Batu Sasak yang mengakibatkan pembiayaan pembangunan desa sangat tergantung pada dana bantuan dan subsidi dari Pemerintah Kabupaten Kampar

METODE

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dalam penelitian ini memulai dengan kerangka pikir yang menggunakan konsep sistem yaitu Input Analisis merupakan fenomena, judul penelitian, dan landasan teori. Proses analisis merupakan metode penelitian dan tujuan penelitian ini. Out Put Analisis merupakan kesimpulan dan saran dalam penelitian ini. Out Come analisis merupakan Peningkatan Keuangan Pembiayaan Pembangunan Desa Dan Terwujudnya Kemandirian Fiskal Desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Data yang di peroleh di kumpulkan serta di uji objektivitasnya dengan cara mengkonfirmasi keterangan nara sumber dengan nara sumber lainnya. Kemudian membandingkan dengan keterangan lisan/dokumen serta menguji hasil wawancara dengan pengamatan yang ada di lapangan.

HASIL PENELITIAN

Analisis Sumber Pembiayaan Pembangunan Desa

1. Sumber Pembiayaan Kovensional

Penerapan dan pengalihan sumber-sumber pembiayaan kovensional tersebut nampak jelas di dalam APBdes Desa Batu Sasak dari 2009 sampai dengan 2011. Sumber-sumber pembiayaan Desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu, masih bersumber pada:

- a. Pendapatan Asli Desa (PAD);
Merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh usaha-usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota;
Merupakan pendapatan keuangan atas pembahagian hasil penetapan pajak oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus)
- c. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota;
Merupakan pendapatan keuangan atas pembahagian hasil penetapan distribusi yang di perlakukan oleh pemerintah kabupaten/kota
- d. Alokasi Dana Desa (ADD);
Merupakan alokasi pemerintah daerah untuk desa yang diperuntukan bagi desa dalam upaya pembiayaan desa dan percepatan pembangunan desa. Alokasi ini bersumber dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima daerah paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus)
- e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Desa lainnya;

Melihat sumber pembiayaan kovensional yang menjadi sumber utama di dalam pembiayaan pembangunan Desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu, dapat disimpulkan untuk terwujud nya otonomi desa di daerah ini sangat sulit di tercapai. Hal ini di karenakan penerimaan keuangan Desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu dari tahun 2009 hingga tahun 2011, sangat tergantung dengan sistem anggaran pemerintah (kovensional) yaitu kucuran anggaran pemerintah diatasnya. Hal tersebut di ikuti dengan lemahnya usaha pemerintah desa di dalam meningkatkan PADes hanya di tahun 2010

menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan desa dengan sumbangsi yang sangat rendah Rp. 3.600.000,- (1,4 %) dari total pendapatan desa di tahun tersebut.

2. Sumber Pembiayaan Non Kovensional

Sesuai definisinya sumber pembiayaan non kovensional merupakan sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari mekanisme bukan anggaran pemerintahan. Modal pembiayaan non kovensional ini berasal dari 3 (tiga) sumber yaitu : (1) pemerintah, (2) swasta, dan (3) masyarakat. Perbedaan mendasar antara modal swasta dan masyarakat ini dapat di lihat dari tujuan masing-masing penyertaan modal di maksud. Peran swasta dalam pembiayaan pembangunan antara lain berorientasi pada provit (keuntungan) swasta, sedangkan peran serta masyarakat lebih kepada kepentingan umum (Fauzi, 2004).

Melihat dari rincian data pendapatan keuangan Desa Batu Sasak belum menerapkan sistem anggaran non kovensional dalam pembiayaan pembangunan desa. Pemerintah Desa masih fokus terhadap pengelolaan penerimaan keuangan yang bersumber dari PADes, dana desentralisasi, bantuan/subsidi dari pemerintah Kabupaten Kampar yang jumlah nominalnya sangat rendah. Hal ini menyebabkan ketidak mampuan desa dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan desa.

Belum diterapkan sumber pembiayaan pembangunan dengan sistem non kovensional dalam mengatasi kekurangan keuangan yang dimiliki Pemerintah Desa disebabkan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Sepertinya belum adanya kebijakan fiskal yang memandai yang memberikan kewenangan optimal yang diberikan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan, termasuk di dalamnya adanya pengelolaan sumber pembiayaan pembangunan dengan sistem non kovensional. Pengelola keuangan Desa Batu Sasak belum mengetahui seperti apa sistem penerimaan non kovensional tersebut. Hal ini terungkap dari pernyataan Ketua Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Batu Sasak.

Hal itu juga menguatkan bahwa salah faktor utama Pemerintah Desa tidak dapat mengelola atau kreatif di dalam mencari-cari sumber lain terhadap pemenuhan kebutuhan keuangan dalam pembiayaan pembangunan seperti pengelolaan sumber-sumber pembiayaan non konvensional adalah tidak adanya pemahaman yang lebih terhadap aturan-aturan pemerintah yang berkaitan dengan keuangan desa. Sehingga Pemerintah Desa hanya mengandalkan sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari sumber-sumber pembiayaan konvensional.

Analisis Upaya dan Faktor Penghambat dalam Mengatasi Keterbatasan Anggaran Pembiayaan Pembangunan Desa

1. Upaya Desa Batu Sasak dalam Mengatasi Keterbatasan Anggaran Pembiayaan Pembangunan Desa

Desa Batu Sasak memiliki begitu banyak persoalan krusial akan kebutuhan dasar masyarakat dan kebutuhan terhadap pembangunan sebagai salah satu desa tertinggal di Kabupaten Kampar. Hal ini berkaitan dengan kekurangan infrastruktur desa, kondisi ekonomi masyarakat rendah, tingkat pendidikan, kesehatan masyarakat yang rendah, dan lain-lain. Namun di dalam memenuhi dari kebutuhan tersebut desa ini tidak memiliki anggaran yang memadai di dalam pembiayaan pembangunan. Desa hanya memiliki anggaran yang bersumber dari dana subsidi/desentralisasi desa dari kabupaten Kampar dengan jumlah sangat terbatas.

Pemerintah Desa Batu Sasak mengakui keterbatasan dana yang dimilikinya dalam membiayai pembangunan desa. Ada beberapa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kekurangan anggaran pembiayaan pembangunan tersebut, yaitu;

- a. Peningkatan Sumber Daya Manusia di dalam menciptakan kemampuan dan daya guna seluruh tatanan, perangkat desa, kelembagaan di dalam pengelolaan keuangan desa sehingga dapat menghasilkan solusi menunjang kesinambungan pembangunan desa dan peningkatan kemandirian desa.
- b. Melakukan upaya *lobby* terhadap pemerintah Kabupaten Kampar untuk mendapatkan

bahagian yang lebih besar dari bagi hasil pajak dan distribusi pemerintah kabupaten yang jumlah setiap tahun tidak ada peningkatan.

- c. Mencari dan mengembangkan sumber PAD dan menetapkan dengan peraturan desa, serta menerapkan pada masyarakat desa. Hal ini meliputi pajak, distribusi dan berbagai pungutan-pungutan desa yang sah yang dilaksanakan dengan berdasarkan azas keadilan dan progresif.
- d. Mengupayakan membentuk Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) yang bergerak dalam distribusi kebutuhan pokok masyarakat, dan menyalurkan asli komoditi masyarakat desa keluar.
- e. Mencoba menjalin kerjasama dengan pihak ketiga di dalam mengembangkan dan produktifkan lahan yang di miliki desa yang masih banyak belum di garap.
- f. Menekan pengeluaran/belanja desa dengan memprioritaskan terhadap kebutuhan pembangunan yang lebih prioritas dan direncanakan dengan efisien dan cermat.
- g. Mengupayakan kesadaran masyarakat desa untuk berpartisipasi didalam proses pembangunan, sehingga pengeluaran dalam pengerjaan proyek dapat di tekan dengan gotong-royong, dan ada sumbangsi keuangan dari masyarakat terhadap keterbatasan keuangan yang dimiliki desa terhadap pembiayaan pembangunan.

Namun upaya Desa Batu Sasak di dalam mengatasi keterbatasan anggaran pembangunan tidak dilakukan dengan optimal. Kenaikan nominal penerimaan keuangan tersebut berasal dari peningkatan jumlah dana yang kucurkan oleh pemerintah Kabupaten Kampar sebagai bentuk dana subsidi/desentralisasi bagi desa, bukan dari kenerja pemerintah desa di dalam peningkatan penerimaan keuangan sebagai pembiayaan pembangunan desa.

Menganalisis upaya-upaya yang di kemukakan Kepala Desa Batu Sasak dalam mensiasati keterbatasan keuangan pembiayaan pembangunan desa tersebut, khususnya point (f) sangat bertolak belakang terhadap realisasi penggunaan anggaran keuangan desa (APBDes) tahun ke tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Batu Sasak sebahagian besar di gunakan untuk keperluan rutin, belanja yang tidak berkaitan langsung pada pembangunan desa (Belanja Tidak Langsung).

2. Faktor-Faktor Penghambat Desa Batu Sasak Dalam Mengatasi Keterbatasan Anggaran Pembiayaan Pembangunan Desa

Dalam mengatasi kekurangan dan keterbatasan anggaran yang dimiliki desa di dalam pembiayaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah Desa Batu Sasak mendapat beberapa hambatan yang sangat berpengaruh.

- a. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang berada di Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- b. Pemerintah Kabupaten Kampar memberikan anggaran yang terbatas terhadap desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu, sehingga anggaran hanya dapat memenuhi sebahagian kebutuhandesanya.
- c. Keuangan desa yang terbatas, sehinggadana yang di miliki desa tidak bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan investasi desa.
- d. Rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak dan retribusi sangat rendah.
- e. Kurangnya distribusi keilmuan pengelolaan keuangan desa dari pemerintah kabupaten Kampar kepada SDM perangkat desa.
- f. Sikap apatis masyarakat desa terhadap pembangunan desa.

SIMPULAN

Pembiayaan pembangunan Desa Batu Sasak yang mengakibatkan sangat tergantung pada

dana bantuan dan subsidi dari Pemerintah Kabupaten Kampar. *Pertama*, belum adanya aturan (kebijakan fiskal) yang mengatur hal tersebut. *Kedua*, Keterbatasan SDM yang di miliki desa di dalam pengelolaan keuangan. *Ketiga*, kekurangan modal bagi desa dalam pengembangan usaha sebagai sumber alternatif penerimaan keuangan. *Keempat*, sikap apatis masyarakat desa dalam kelanjutan pembiayaan pembangunan desa.

DAFTAR RUJUKAN

- Harmano, (2009) *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard Pendekatan Teori, Kasus, dan Riset Bisni*. Jakarta: Bukmi Aksara.
- Lincoln, Elan, Jakung & Ardyanto (2011) *Strategi Pembangunan Perdesaan Berbasis Lokal*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nugroho, Rian (2003) *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta. Elekmedia Komputindo.
- Mahmudi, (2010) *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga,
- S. Tangkilan, Hessel Nogi (2005) *Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Biokrasi Publik*. Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik.
- Thoha, Miftah (2002) *Biokrasi & Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Widjaja, HAW (2002) *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada